



Masyarakat Yogyakarta Bisa Dapatkan Layanan Publik dari Rumah

WAHYU SURYANA

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta menekankan tidak akan membahas dulu wacana Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah. Justru, mereka mulai menghadirkan layanan-layanan publik yang bisa didapatkan masyarakat dari rumah.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menilai, wacana ASN yang bekerja dari rumah merupakan mimpi yang masih sangat jauh untuk diwujudkan. Apalagi, hingga kini data-data masih belum terintegrasi.

Padahal, ia merasa, kehadiran era digitalisasi sudah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat. Termasuk, layanan-layanan publik yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya.

Ini pula yang jadi latar belakang Pemkot Yogyakarta mulai menerapkan *paperless*. Artinya, mulai meminimalkan data-data publik yang masih berbentuk fisik di meja, lemari dan kantor-kantor ke bentuk digital.

"Jadi, kita tidak bicara ASN bekerja dari rumah, tapi warga terlayani dari rumah," kata Heroe saat peluncuran E-IRTP, Surat Warga dan Antrian Puskesmas di Kecamatan Jetis, Jumat (23/8).

E-IRTP, misal, memudahkan pelaku-pelaku industri rumah tangga pangan di Kota Yogyakarta tidak cuma untuk mengurus sertifikasi IRTP. Tapi, untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin-izin lain.

Sedangkan, Antrian Puskesmas memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan dari puskesmas. Tujuannya, menghilangkan antrean-an-

trean panjang masyarakat yang biasanya terlihat di puskesmas-puskesmas.

Beragam layanan itu sendiri sudah bisa dinikmati masyarakat dengan mengunduh aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Syaratnya, memiliki KTP Kota Yogyakarta karena akan menggunakan NIK asli warga tersebut.

Namun, Heroe menekankan, tiga layanan yang menambah banyak layanan-layanan publik yang ada di Jogja Smart Service itu tidak boleh lagi berdiri sendiri. Semuanya harus memiliki data yang terintegrasi.

Antrian Puskesmas, misalnya, setidaknya harus bisa memberikan input data-data kesehatan masyarakat. Sehingga, dapat memetakan kondisi kesehatan dan melahirkan tindakan-tindakan penanganan yang tepat.

Seperti data kemiskinan atau data kematian, harus terintegrasi bagi puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil dan lain-lain. Artinya, konsep Smart City benar-benar efektif dan efisien.

"Semua harus terhubung dan terkoneksi sehingga Smart City yang kita bangun membuat kita kerja cerdas, kita ingin semuanya terintegrasi," ujar Heroe.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia menuturkan, saat ini memang belum semua puskesmas di Kota Yogyakarta sudah terapkan Antrian Puskesmas. Tapi, sudah ada lima dari total 18 puskesmas.

Mulai Puskesmas Jetis, Umbulharjo 1, Umbulharjo 2, Kraton dan Puskesmas Mantrijeron. Pemesanan nomor antrian bisa dilakukan masyarakat tiga hari sebelum pemeriksaan di puskesmas yang dimaksud.

Fita menekankan, verifikasi pendaftaran itu cuma akan dilakukan selama jam kerja. Ia berharap, inovasi ini dapat jadi kado tidak cuma bagi Kota Yogyakarta, tapi bagi HUT ke-74 Republik Indonesia. "Kami yakin layanan jauh dari kesempurnaan, tapi kami akan terus berinovasi dan berbenah diri," kata Fita.

Selain KTP Kota Yogyakarta, masyarakat tentu saja harus memiliki BPJS jika ingin mendapat layanan BPJS. Fita menekankan, aplikasi ini tidak cuma menjadikan layanan publik mudah didapatkan masyarakat.

Fita menargetkan, akhir tahun ini semua puskesmas sudah menerapkan Antrian Puskesmas. Sehingga, pemanfaatan digitalisasi sistem bisa dirasakan lebih banyak masyarakat Kota Yogyakarta.

ed: fernan rahadi

Instansi	Sifat	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
	<input type="checkbox"/> Amat Segera	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005